

**Judul** : Kunker Ke Kukar. Komisi IV DPR Tertibkan Tambang Batubara Ilegal  
**Tanggal** : Minggu, 29 Januari 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 14

## Kunker Ke Kukar Komisi IV DPR Tertibkan Tambang Batubara Ilegal

ANGGOTA Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) bersama rombongan Komisi DPR ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), kemarin. Mereka meninjau aktivitas tambang batubara, yang diduga telah merusak lingkungan hidup di kabupaten tersebut.

Akmal menegaskan, Komisi IV DPR bersama Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menertibkan kawasan tambang batubara, yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara, di Kutai Kartanegara, Kaltim.

Menurut dia, perusahaan tersebut telah beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yang sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.

Pihaknya menerima laporan dan aspirasi dari berbagai komunitas masyarakat, soal gangguan lingkungan akibat aktivitas tambang.

“Gangguan itu mengganggu kualitas hidup masyarakat, karena menurunkan kualitas air bersih dan membuat jalan berlubang,” ujar Akmal melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan ada eksploitasi tambang batubara yang merusak lingkungan hidup dan ekosistem alam.

Dia memastikan, kegiatan tersebut juga telah merugikan negara, sehingga seluruh alat negara perlu turun tangan, untuk menegakan hukum dan memberikan

hukuman setegas-tegasnya.

Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang, serta berbagai kerugian dan berbahaya lain bagi masyarakat, harus segera ditindaklanjuti.

“Kami mendorong Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas sesuai undang-undang, serta berbagai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, Akmal juga mendorong Pemerintah dan aparat seluruh aparat yang dimiliki negara, segera melakukan penertiban dan penindakan secara perdata maupun pidana.

Dia pun memastikan, Komisi IV DPR akan bersinergi dengan Pemerintah untuk mengawal proses hukum, dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Masyarakat harus mendapat perlindungan, dan diperlukan kehadiran negara untuk menjamin seluruh hak mereka.

Komisi IV DPR akan menindaklanjuti kasus ini melalui rapat kerja gabungan dengan seluruh instrumen terkait, agar masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat keadilan.

Akmal menambahkan, pihaknya juga akan menginventarisir dan mengusulkan penyegelan terhadap tambang di kawasan hutan yang belum memiliki izin.

“Intinya, Komisi IV DPR mendorong Pemerintah, segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan undang-undang berlaku, yakni Undang-Undang tentang Lingkungan dan Kehutan,” tandasnya. ■ SSL